



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II

Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Telp. (061) 7870760 – Fax. (061) 7866782
M E D A N

NOTA DINAS

NOMOR : ND. 32/BPHLII-1/1/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PHL
Dari : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari II Medan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023
Tanggal : 15 Januari 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : ND.778/SET.5/PEHKT/REN.2/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan sebagaimana laporan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kusnadi, S.Hut, M.Si
196609221998031002

Tembusan :

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Laporan).



**LAPORAN KINERJA
BPHL WILAYAH II MEDAN
TAHUN 2023**

DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja adalah pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya pencapaian target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) yang didasarkan pada dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen penetapan kinerja antara lain berisi indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran, sedangkan dokumen perencanaan memuat visi dan misi Pembangunan Nasional Tahun 2021-2024 serta tujuan dan sasaran organisasi. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditugaskan melaksanakan program **"Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"**. Keluaran (output) secara kuantitatif tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diperoleh melalui pemantauan/pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap pencapaian kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana/target dan kinerja aktual tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang yang berguna bagi semua pihak.

Medan, 15 Januari 2024

Kepala Balai,



Kusnadi, S.Hut., M. Si

NIP. 19660922 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN KINERJA	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	67
C. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional.....	71
IV. PENUTUP	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Capaian Kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023	1
Tabel 2 Sumber Daya Manusia BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023	5
Tabel 3 Matrik Sasaran Kegiatan dan Rincian Output BPHL Wilayah II Medan	13
Tabel 4 Alokasi PAGU Anggaran Per Output Tahun Anggaran 2023.....	15
Tabel 5 Capaian Kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023	19
Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023....	21
Tabel 7 Capaian Kinerja BPHL Wilayah X Medan Tahun 2021-2023.....	22
Tabel 8 Perbandingan Nilai Implementasi SAKIP	26
Tabel 9 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023	34
Tabel 10 Fasilitas/pembinaan teknis pada PBPHH di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan.....	59
Tabel 11 Kegiatan Koordinasi perizinan berusaha hasil hutan skala usaha kecil dan menengah	59
Tabel 12 Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi UMKM oleh BPHL Wilayah II Medan.....	62
Tabel 13 Kegiatan Pengawasan/supervisi dan monev pada PBPHH	63
Tabel 14 Kegiatan Pemantauan dan monev harga pasar/RPBBI/sertifikasi industri hasil hutan pada PBPHH	65
Tabel 16 Rincian Target dan Realisasi Capaian Output BPHL Wilayah II Tahun 2023.....	67
Tabel 17 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana dan Jenis Belanja Tahun 2023	69
Tabel 18 Capaian Kegiatan Prioritas Nasional	71

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Tabel 1 Struktur Organisasi BPHL Wilayah II Medan	4
Tabel 2 Nilai SAKIP Eselon I Lingkup Kementerian LHK Tahun 2022	28
Tabel 3 Rapat Pengelolaan Kinerja Ditjen PHL.....	30
Tabel 4 Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Ditjen PHL	31
Tabel 5 Milestone Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024	33
Tabel 6 Pengawasan dan Implementasi RPHJP/RPHJPd pada KPH Wilayah XV Kabanjahe.....	40
Tabel 7 kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha berupa Pemantauan dan monev usaha pemanfaatan hutan	44
Tabel 8 kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan PBPH dengan Masyarakat pada PBPH PT. Multi Sibolga Timber di Kabupaten Tapanuli Tengah	45
Tabel 9 peningkatan kapasitas/pelatihan kelompok masyarakat melalui pelatihan budidaya lebah madu dengan KTH yg bermitra dengan PT. Toba Pulp Lestari	46
Tabel 10 Pengawasan dan pengendalian sertifikasi penilaian PHL/produksi hasil hutan/luas penanaman pada PBPH	48
Tabel 11 Pengawasan Kegiatan Perlindungan Hutan pada PBPH PT. Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Padang Lawas.....	50
Tabel 12 Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Kemitraan Kehutanan pada PBPH PT. Toba Pulp Lestari Sektor Tele Di Kabuapten Samosir.....	51
Tabel 13 Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan pada PBPH PT. Gunung Raya Utama Timber Industries	53
Tabel 14 Kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan	54
Tabel 15 kegiatan Pemantauan dan evaluasi tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan	56
Tabel 16 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan	58

Tabel 17	Kegiatan Pembekalan Operator SIPUHH pada pemegang persetujuan Perhutanan Sosial (HKM/HD/Kemitraan) di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan bertempat di Pematangsiantar	60
Tabel 18	Kegiatan Pembekalan Operator SIPUHH pada pemegang persetujuan Perhutanan Sosial (HKM/HD/Kemitraan) di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan bertempat di Padangsidempuan.....	61
Tabel 19	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan	63
Tabel 20	Kegiatan Pengawasan atau pengendalian/evaluasi kinerja Perizinan Pengolahan Hasil Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Revisi Perjanjian Kinerja BPHL BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023

Lampiran 2. Pohon Kinerja Ditjen PHL Tahun 2023

Lampiran 3. Matriks Cascading Kinerja IKP, IKK, RO Ditjen PHL Tahun 2023

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023 adalah bahan laporan capaian kinerja selama tahun 2023 yang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing output dari Rincian Output. Hasil pengukuran rata-rata kinerja BPHL Wilayah II Medan pada Tahun 2023 adalah sebesar 109,23 %.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin	78.62 Poin	95.88%
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4	Level 4	100%
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan			
		Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari			
3.	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan			
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	120%*)
4.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan			
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	5 Badan Usaha	120%*)
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu			
5.	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100%
		Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat			
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

6.	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT			
		Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	100%
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan			
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha	11 Badan Usaha	120%*)
7.	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK			
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha	26 Badan Usaha	120%*)
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	9 Badan Usaha	59 Badan Usaha	120%*)
8.	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK			
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM	1 UMKM	100%
RATA-RATA					109,23 %

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, agar tidak terjadi bias perhitungan dan capaian per output maksimal 120%, maka capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

PAGU anggaran BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023 sebesar Rp.9,077,220,000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 7,536,102,000,- dan PNPB sebesar Rp. 1,541,118,000,- , dengan realisasi 9,065,633,480,- (99,87).

Hasil capaian kinerja BPHL Wilayah II Medan senilai 109,23% sedangkan penggunaan anggaran senilai 99,87%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan anggaran BPHL Wilayah II Medan senilai 0,91.

Melalui Laporan Kinerja BPHL Wilayah II Medan tahun 2023, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk penilaian pencapaian kinerja Balai sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPHL Wilayah II Medan Tahun 2020-2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja BPHL Wilayah II Medan dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai utamanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal PHL. Laporan kinerja (LKj) ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPHL Wilayah II Medan di tahun-tahun berikutnya. Karena itu LKj harus mengungkapkan secara memadai hasil analisis dari pengukuran kinerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

BPHL Wilayah II Medan sebagai salah satu unit kerja dari Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya.

B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari menetapkan fungsi yang diselenggarakan oleh BPHL Wilayah II adalah :

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

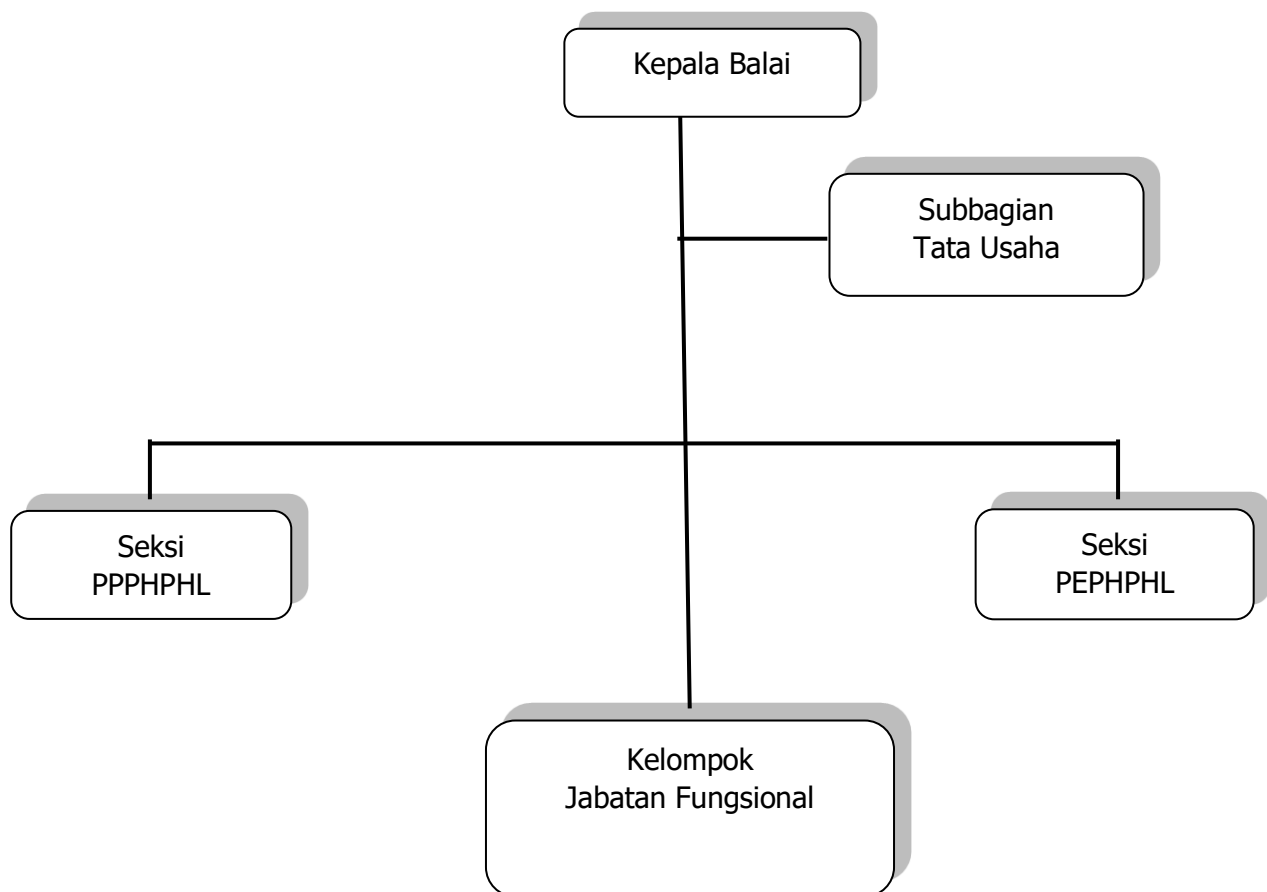
Semua bagian/seksi berkoordinasi dalam pelaksanaan tupoksi BPHL Wilayah II Medan dengan pembagian tugas berdasarkan bagian/seksi sebagai berikut :

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
- Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan disajikan pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi BPHL Wilayah II Medan



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

Tabel 2. Sumber Daya Manusia BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023

No	Bagian/Seksi	Pegawai Negeri Sipil										Jumlah PNS	Tenaga Kontrak				Total
		Kehutanan					Non Kehutanan										
		S3	S2	S1	D3	SKM A	S3	S2	S1	D3	SMA		S 1	D 3	SKMA/SLTA	JML H	
1.	Kepala Balai							1				1					1
2.	Sub Bagian Tata Usaha								1		3	4	4		9	13	17
3.	Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari			1				2				3					3
4.	Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Lestari			1				2			1	4					4
5.	Kelompok Jabatan Fungsional			10	3	7		2	7	1		30					30
Jumlah		0	0	12	3	7	0	7	8	1	4	42	4		9	13	55

BPHL Wilayah II Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Balai yang dibantu oleh 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) seksi setingkat pejabat eselon IV. Masing-masing bagian/seksi, terdiri dari beberapa staf di bawahnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 9 (sembilan) orang staf, Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung membawahi 4 (empat) orang staf, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung membawahi 3 (tiga) orang staf, Jabatan Fungsional sebanyak 15 (lima belas) orang . Total pegawai BPHL wilayah II Medan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personil.

BPHL Wilayah II Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.077.220.000,-.

D. Strategic Issue BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023

Sebagai bentuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL, BPHL Wilayah II Medan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dengan fokus pada beberapa isu strategis yang berkembang pada tahun ini, meliputi :

1. Balai juga berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim dengan menyelenggarakan kegiatan terkait Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030 berkoordinasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam upaya penurunan emisi karbon. Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi NDC, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution / NDC), Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi GRK ke UNFCCC dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan dengan dukungan Internasional sebesar 41%. Selanjutnya pada 23 September 2023, Indonesia menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah

kaca melalui dokumen Enhanced NDC dengan kemampuan sendiri 31,89% dan dengan dukungan Internasional sebesar 43,20%. Untuk mendukung upaya pengendalian perubahan iklim dapat dilakukan melalui tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK), salah satunya melalui perdagangan karbon.

3. Terjadinya pergeseran paradigma pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan pasca implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Multiusaha kehutanan akan meningkatkan nilai ekonomi hutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan antara lain, ketersediaan bahan baku pengolahan hasil hutan dan peningkatan ekspor produk industri kehutanan. Multiusaha kehutanan juga menjamin ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan PNPB pemanfaatan hutan.
4. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) masih harus diberikan tambahan pemahaman terhadap kepatuhan pelaporan kinerja di lapangan, untuk itu diperlukan optimalisasi monitoring pelaporan GANISPH pada SIGANISHUT.
5. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian), dikarenakan kurangnya dukungan finansial akibat sulitnya suplai bahan baku yang mengakibatkan produksi tidak konstan.

Kelima fokus kegiatan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi BPHL Wilayah II Medan untuk tercapainya tujuan organisasi Ditjen PHL secara keseluruhan.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, SDM, Isu Strategis 2023

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar : Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja (IKK) sesuai Perjanjian Kinerja (PK), berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan analisis.

Membandingkan

- Antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
- Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra;
- Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/internasional (jika ada);

Analisis

- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Efisiensi penggunaan sumber daya;
- Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. . Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Dalam rancangan Rencana Strategis yang telah disusun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK, antara lain :

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode

perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK, menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020- 2024, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Hutan Produksi Berkelanjutan Berbasis Multi Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Untuk Meningkatkan PNPB dan Kesejahteraan serta Kemandirian Masyarakat”**.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL, antara lain :

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program **“Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”** yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.

2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan hutan produksi lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja BPHL Wilayah II Medan tahun 2023 didasarkan pada Buku Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penugasan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan. Rencana Kerja ini memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPHL Wilayah II Medan pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran yang telah disetujui untuk digunakan. Namun kinerja yang disepakati tidak hanya terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya.

BPHL Wilayah II Medan telah melakukan perjanjian kinerja dalam bentuk pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pakta Integritas bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama, dan memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Kinerja BPHL Wilayah II Medan berpedoman pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2023.

BPHL Wilayah II Medan merupakan salah UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan di bawah Direktorat Jenderal PHL bertanggungjawab terhadap kegiatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan serta Program Dukungan Manajemen di wilayah Sumatera Utara. BPHL Wilayah II Medan ikut berkontribusi melalui 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) rincian output kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matrik Sasaran Kegiatan dan Rincian Output BPHL Wilayah II Medan

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	
		Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif	1 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
3.	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	
		Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha
5.	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
6.	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	
		Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	5 Badan Usaha

		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha
7.	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	9 Badan Usaha
8.	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BPHL Wilayah II Medan diberi tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan **“Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”** dengan alokasi pagu Rp. 9.077.220.000,- bersumber dari APBN berupa Rupiah Murni (RM) sejumlah Rp. 7.536.102.000,- dan bersumber dari PNBP sejumlah Rp. 1.541.118.000,-. Alokasi pagu tersebut terdistribusi ke dalam 13 (tiga belas) Rincian Output sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Alokasi PAGU Anggaran Per Output Tahun Anggaran 2023

OUTPUT KEGIATAN	PAGU ALOKASI	
	RP	%
Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif sebanyak 1 Lembaga	241,233,000	2,66%
Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari sebanyak 1 Lembaga	230,777,000	2,54%
Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan sebanyak 2 Badan Usaha	216,692,000	2,39%
Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha	363,575,000	4,01%
Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan sebanyak 4 Badan Usaha	632,201,000	6,96%
Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan sebanyak 2 Kelompok Masyarakat	95,000,000	1,05%
Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebanyak 5 Badan Usaha	177,965,000	1,96%
Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sebanyak 7 Badan Usaha	367,705,000	4,05%
Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan sebanyak 8 Badan Usaha	265,011,000	2,92%
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya sebanyak 9 Badan Usaha	353,615,000	3,90%
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL sebanyak 1 UMKM	221,683,000	2,44%
Layanan Umum sebanyak 1 Layanan	180,000,000	1,98%
Layanan perkantoran BPHL sebanyak 1 Layanan	5,731,763,000	63,14%
JUMLAH	9,077,220,000	100%

Perjalanan anggaran Ditjen PHL tahun 2023 cukup panjang dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA), menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja Pegawai, dan dengan disetujuinya penggunaan IIUPH/IPBPH, sebagaimana tahapan berikut:

1. Pagu anggaran awal Ditjen PHL tahun 2023 adalah sebesar Rp252.624.634.000,-. Pada bulan Desember 2022 melalui Memorandum Menteri LHK Nomor M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022, Ditjen PHL dikenakan beban AA sebesar Rp8.716.352.000,-, yaitu pada Belanja Pegawai sebesar Rp3.348.936.000,- dan Belanja Non Operasional pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp5.367.416.000,-. Beban AA pada Belanja Pegawai ditempatkan pada Sekretariat Ditjen PHL sebesar Rp2.113.936.000,- dan 7 (tujuh) satker BPHL (Medan, Jambi, Palembang, Pontianak, Samarinda, Palu, dan Makassar). Sedangkan beban AA Belanja Non Operasional adalah pada 15 (limabelas) BPHL (kecuali Surabaya).
2. Sesuai dengan No Objection Letter (NoL) tanggal 23 Februari 2023 dan Annual Work Plan (AWP) Forest Investment Program – FIP I, Ditjen PHL mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.308.336.000,- yaitu pada Direktorat BRPH sebesar Rp595.138.000,- dan pada BPHL Wilayah VIII Pontianak sebesar Rp713.198.000,-. Dengan tambahan pagu anggaran sumber dana Hibah Luar Negeri tersebut, pagu anggaran Ditjen PHL mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp253.932.970.000,-.
3. Menindaklanjuti surat Menteri LHK Nomor S.702/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/ 7/2023 tanggal 11 Juli 2023 beban AA Belanja Pegawai sebesar Rp3.348.936.000,- direalokasi ke Bendahara Umum Negara dan pagu Ditjen PHL berkurang menjadi sebesar Rp250.584.034.000,-.
4. Selanjutnya, menindaklanjuti surat Menteri LHK Nomor S.1098/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, beban AA Belanja Non Operasional pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp5.367.416.000,- direalokasi ke Bendahara Umum Negara. Dengan realokasi tersebut, pagu Ditjen PHL berkurang menjadi sebesar Rp245.216.618.000,-.
5. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1157/SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Hal Optimalisasi Belanja Pegawai dalam

Pemenuhan Pembayaran Gaji PPPK Lingkup KLHK, dilaksanakan realokasi Belanja Pegawai antar unit kerja eselon I lingkup KLHK dan antar satker lingkup Ditjen PHL. Pagu Belanja Pegawai Ditjen PHL mendapat tambahan anggaran dari Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.396.742.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen PHL bertambah menjadi Rp246.613.360.000,-.

6. Melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2023 Tanggal 29 Oktober 2023 Hal Persetujuan Penggunaan Dana PNBP IIUPH/IPBPH pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen PHL mendapatkan tambahan pagu sumber dana PNBP sebesar Rp1.389.000.000,- yang dialokasikan pada 5 (lima) Direktorat pengampu Kegiatan. Pagu anggaran Ditjen PHL bertambah menjadi sebesar Rp248.002.360.000,-.
7. Masih terkait Belanja Pegawai, setelah dilakukan realokasi sebagaimana disampaikan pada poin 5, dari perhitungan secara cermat untuk kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2023, ternyata masih terdapat kekurangan Belanja Pegawai. Berkenaan dengan hal tersebut serta untuk menyiapkan kebutuhan anggaran dalam rangka kenaikan tunjangan kinerja, Ditjen PHL kembali mendapatkan tambahan anggaran Belanja Pegawai melalui surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1310/SETJEN/ROCAN/REN.0/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023 dan Nomor S.1323/SETJEN/ROCAN/REN.0/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Optimalisasi Belanja Pegawai KLHK Tahun 2023. Ditjen PHL mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.654.800.000,- dan pagu anggaran Ditjen PHL menjadi Rp249.657.160.000,-.

C. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator- indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah atas masukan menjadi

keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap capaian sasaran dan tujuan. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja (PK) yang diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi kegiatan atas rencana kegiatan, maka menggambarkan capaian indikator kinerja yang semakin baik. Penghitungan prosentase Capaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PROSENTASE CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100$$

2. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja sasaran Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara pelaksanaan anggaran dengan capaian kinerja (fisik) tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja sasaran yang dilaksanakan tahun 2023.

$$\text{EFISIENSI CAPAIAN KINERJA} = \frac{\% \text{ CAPAIAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN}}{\% \text{ CAPAIAN KINERJA FISIK TAHUN BERJALAN}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori inefisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran efisien.

3. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II merupakan penjabaran hasil-hasil yang dicapai berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai dan Dirjen PHL. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing output dari Rincian Output. Hasil pengukuran rata-rata kinerja BPHL Wilayah II Medan pada Tahun 2023 adalah sebesar 109,23 %.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin	78.62 Poin	95.88%
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4	Level 4	100%
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan			
		Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari			
3.	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan			
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	120%*)
4.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan			
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	5 Badan Usaha	120%*)
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu			
		Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

5.	Meningkatnya pembinaan pemanfaaaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat			
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	100%
6.	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT			
		Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	100%
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan			
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha	11 Badan Usaha	120%*)
7.	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK			
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha	26 Badan Usaha	120%*)
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	9 Badan Usaha	59 Badan Usaha	120%*)
8.	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK			
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM	1 UMKM	100%
RATA-RATA					109,23%

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, agar tidak terjadi bias perhitungan dan capaian per output maksimal 120%, maka capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 114,28% dengan realisasi anggaran 99,62% diperoleh nilai ratio pelaksanaan sasaran sebesar 0,87. Sedangkan Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 109,23% dengan realisasi anggaran 99,87% diperoleh nilai ratio pelaksanaan sasaran sebesar 0,91.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	-	-	82 Poin	78.62 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	-	-	Level 4	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	-	-	1 Laporan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan				
		Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif	1 Lembaga	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari				
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	5 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga
3.	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan				
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha
4.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan				
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	1 Badan Usaha	5 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu				
		Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha
5.	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat				
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	-	-	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

6.	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT				
		Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	5 Badan Usaha	8 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan				
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha	10 Badan Usaha	7 Badan Usaha	11 Badan Usaha
7.	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK				
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha	13 Badan Usaha	8 Badan Usaha	26 Badan Usaha
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	8 Badan Usaha	13 Badan Usaha	9 Badan Usaha	59 Badan Usaha
8.	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK				
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM	2 UMKM	1 UMKM	1 UMKM

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dari tahun 2021 ke tahun 2022 penyerapan anggaran mengalami peningkatan sebesar 0.87%. Sedangkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,25%. Capaian kinerja Balai dari tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 4,68% dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 5,05%. Untuk Efisiensi Capaian Kinerja pada BPHL Wilayah II Medan dari tahun 2021-2023 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi < 1).

Tabel 7. Capaian Kinerja BPHL Wilayah X Medan Tahun 2021-2023

Pengukuran Kinerja	Tahun		
	2021	2022	2023
Penyerapan Anggaran (%)	98,75	99,62	99,87
Capaian Kinerja (%)	109,6	114,28	109,23
Efisiensi Capaian Kinerja	0,90	0,87	0.91

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Sesuai Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B-517/M.PPN/ D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Balai Pengelolaan Hutan Lestari tidak memiliki kegiatan tersendiri. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan suatu pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow program*. Dengan kebijakan tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Lestari melaksanakan kegiatan yang melekat pada Direktorat, untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat dan selanjutnya menunjang pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Pada dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah pada level Rincian Output (RO), dimana target volume Rincian Output untuk setiap Balai Pengelolaan Hutan Lestari ditentukan oleh Direktorat. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka capaian Rincian Output pada tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Capaian Kinerja Tiap Rincian Output

Capaian kinerja BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023 dianalisis dan dijabarkan dalam Rincian Output sebagai berikut:

Rincian Output 1 (RO-1) : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, desain rancangan evaluasi SAKIP mengalami penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, yang mulai diimplementasikan pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021.

Penguatan SAKIP merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 mencakup:

1. Birokrasi harus efektif, efisien dan ekonomis;
2. Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcome* (hasil);
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi;
5. Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu.

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan diharapkan semakin baik, yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan) SAKIP dalam Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*;
2. Organisasi: Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan;
3. Tata laksana: Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi;
4. Pengawasan: Memberikan keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai;
5. Budaya kinerja: Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya.

Peraturan Menteri PANRB sebagaimana di atas telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan SAKIP yang terdiri dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%);
2. Pengelolaan Kinerja Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
3. Dukungan kinerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang pada tahun 2023 dan 2024 meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi (dalam rangka penurunan *stunting*), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian Inflasi.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Program Dukungan Manajemen. Target nilai SAKIP tahun 2022 (yang dinilai pada tahun 2023) sesuai yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 adalah sebesar 82 poin dan tercapai sebesar **78,62** poin (95,88%) dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

Raihan nilai implementasi SAKIP tahun 2022 turun dibanding tahun 2021 (81,39 poin). Perbandingan nilai SAKIP sejak tahun 2016 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Implementasi SAKIP

No	Komponen	Nilai Maksimum (2016-2020)	Nilai Maksimum (2021)	Nilai							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Target)
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22,5	23,87	24,02	25,01	22,53	23,33	23,88	
2	Pengukuran Kinerja	25	30	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93	24,00	24,90	
3	Pelaporan Kinerja	15	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18	12,30	11,46	
4	Evaluasi Internal	10	25	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61	21,75	18,38	
5	Pencapaian Kinerja	20	-	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75	-		
Jumlah Total		100	100	70,61	73,19	77,70	79,00	80,00	81,39	78,62	83,00
Predikat				BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	

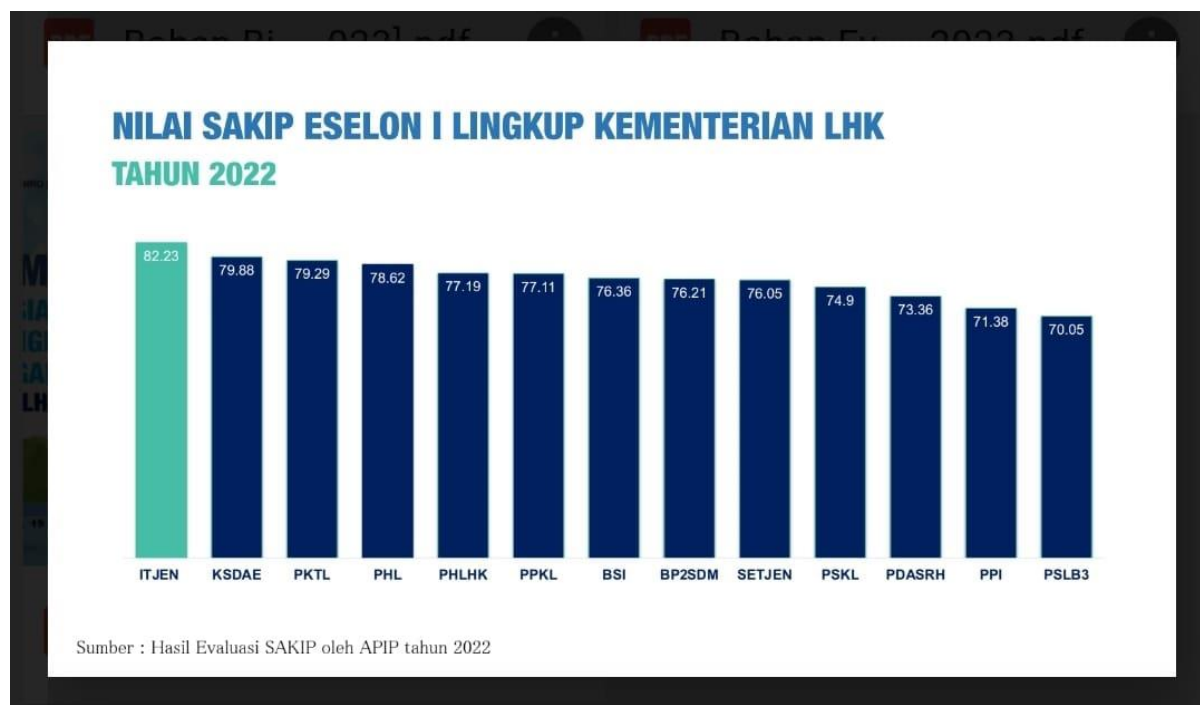
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP melalui surat Inspektorat Jenderal Nomor SP.79/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/5/2023 Tanggal 3 Mei 2023, rekomendasi/saran perbaikan yang disampaikan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan implementasi Perencanaan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
 - b. melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.;
2. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pengukuran Kinerja secara periodik setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. melakukan penyempurnaan Perdirjen PHL Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar

Pengukuran Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dengan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data yang dapat diandalkan;

- b. memanfaatkan sistem pengukuran capaian kinerja untuk penerapan reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pelaporan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:
- a. melaksanakan reviu terhadap laporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, serta melengkapi pelaksanaan reviu dengan dokumentasi yang memadai;
 - b. melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Laporan Kinerja dengan menginformasikan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - c. memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam rangka peningkatan budaya kinerja organisasi.
4. Meningkatkan kualitas atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
- a. melakukan evaluasi AKIP secara mandiri meliputi evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi Akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
 - b. menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitor secara periodik.

Terhadap seluruh rekomendasi di atas, sepanjang tahun 2023 Ditjen PHL secara bertahap telah melakukan perbaikan/penyempurnaan, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP. Memperhatikan nilai SAKIP lingkup KLHK, capaian Ditjen PHL berada pada posisi keempat dan memberikan kontribusi positif pada capaian nilai SAKIP KLHK. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk KLHK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah sebesar 73,07 poin, dengan predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan warta mengenai Kementerian PANRB Gelar SAKIP dan RB AWARD 2021 pada tanggal 5 April 2022,, disampaikan bahwa dari 79 Kementerian/Lembaga yang dinilai terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP menjadi 71,30, dari sebelumnya sebesar 70,75.



Gambar 2. Nilai SAKIP Eselon I Lingkup Kementerian LHK Tahun 2022

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terdapat indikasi kesenjangan implementasi SAKIP antara level unit kerja eselon I dengan unit kerja dibawahnya, yang menjadi salah satu penyebab turunnya nilai implementasi SAKIP tahun 2022. Berdasarkan evaluasi, beberapa faktor penyebab penurunan nilai SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 antara lain:

1. Adanya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang merupakan alat bantu utama dalam penilaian implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I. Berkenaan dengan belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai LKE sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88/2021, masih ditemui kesulitan dalam pemahaman pernyataan yang tercantum pada LKE, termasuk dalam pengumpulan dokumen bukti pendukung;
2. Proses penilaian implementasi SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 telah sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Hal ini berbeda dengan penilaian implementasi SAKIP tahun 2021, dimana penilaian masih dilaksanakan pada masa transisi dari peraturan tersebut;
3. Proses penilaian implementasi SAKIP Tahun 2021 hanya dilaksanakan pada level eselon I (Ditjen PHL), sedangkan untuk tahun 2022 selain pada level eselon I, juga dilakukan penilaian implementasi SAKIP pada 3 (tiga) Direktorat

teknis (Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan) dan 1 (satu) unit pendukung (Sekretariat Ditjen).

Selanjutnya, untuk dapat mencapai target nilai SAKIP yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perlu upaya dan sinergi semua elemen di lingkup internal Ditjen PHPL. Langkah nyata yang ditempuh sepanjang tahun 2023 diantaranya:

1. Menggaungkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP pada jajaran pimpinan lingkup Ditjen PHL, yang disampaikan secara rutin oleh Bapak Dirjen PHL, pada setiap evaluasi berkala periode Triwulan;
2. Membentuk Tim Penguatan SAKIP Ditjen PHL melalui Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.140/PHL/Set.5/Ren.0/6/2023 tentang Pembentukan Tim Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PHL;
3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja pada tanggal 11 – 13 Januari 2023 di Bandung, yang salah satu agendanya adalah penyampaian materi Penguatan Kapasitas dan Strategi Pencapaian SAKIP 2024 oleh Inspektur Wilayah III KLHK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Pengelola Kinerja.





Gambar 3. Rapat Pengelolaan Kinerja Ditjen PHL

4. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP pada tanggal 6-8 Juli 2023 di Badung, Bali, dengan pendampingan Tim Auditor Wilayah III KLHK. Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan membangun penyamaan pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan pada LKE SAKIP, beserta penjelasan mengenai dokumen pendukung, untuk seluruh komponen penilaian SAKIP. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL, yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Penguatan SAKIP.





Gambar 4. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Ditjen PHL

5. Menyampaikan Memorandum Direktur Jenderal Nomor M.17/PHL/Set.5/Ren.2/7/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja;
6. Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada aplikasi e-SAKIP KLHK, oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL.
7. Berperanserta pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi pada tanggal 12 September 2023 dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri AKIP pada tanggal 15 Desember 2023. Kedua kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK.

Rincian Output 2 (RO-2) : Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam implementasi SPIP diperlukan adanya suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang dikenal dengan Maturitas SPIP. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa proses penilaian maturitas SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur secara optimum. Tingkatan tersebut setara masing-masing dengan level 0 sampai dengan 5, dimana semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap unit organisasi. Penilaian Mandiri Maturitas tersebut terdiri dari :

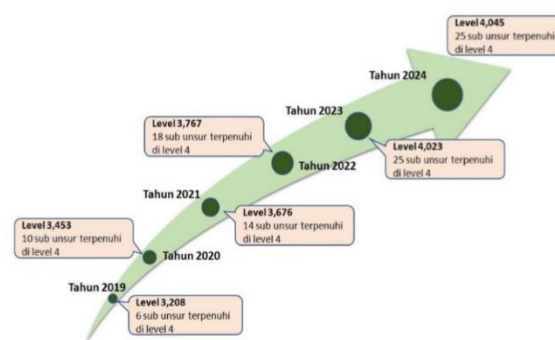
1. Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
2. Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
3. Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung target nilai maturitas SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Ditjen PHL juga telah menetapkan target tahunan sebagai berikut:

Gambar 5. *Milestone* Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024

Target Nilai Maturitas Ditjen PHPL Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan target tersebut, diharapkan pada tahun 2023 Ditjen PHL memperoleh skor maturitas SPIP sebesar **4,023** yang berada pada tingkat “terkelola”.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup Ditjen PHL dilakukan oleh Tim Penilaian Maturitas SPIP tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.89/PHL/SET.5/REN.2/3/2023. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PHL dilakukan pada bulan Maret – Mei 2023.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2023 pada Ditjen PHL telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KLHK melalui surat Nomor S.561/PHL/SET.5/SET.1/5/2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023

No	Penilaian	Penilaian Mandiri	
		Nilai	Level
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,43	4
2	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	4,48	4
3	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	3,64	3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perolehan nilai maturitas SPIP tahun 2023 adalah sebesar **4,43**, lebih tinggi dari perolehan nilai maturitas tahun 2022 sebesar 3,90. Nilai maturitas SPIP sebesar 4,43 berada pada **level 4 (Terkelola)**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian maturitas SPIP adalah sebesar 100%. Berdasarkan data pada Portal Satu Data Indonesia - Bappenas, pada tahun 2022, dari 33 Kementerian, terdapat 1 (satu) Kementerian yang mencapai maturitas SPIP level 4, yaitu Kementerian Keuangan. Tiga Kementerian masih berada pada maturitas level 2, dan 29 Kementerian lainnya, termasuk KLHK, berada pada level maturitas Terdefinisi (level 3).

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko. Menyelaraskan dengan terbitnya regulasi tersebut juga disertai dengan pengembangan aplikasi SIMAWAS yang digunakan untuk merekam penyelenggaraan SPIP. Terhadap perubahan tersebut **seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PHL** berperan serta positif dalam penyelenggaraan SPIP dengan mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, yaitu :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Permen LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023;

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Satuan Kerja;
3. Ekspose Progres Penyusunan Rencana Pengendalian Intern Tahun 2024 Mitra Satker Daerah;
4. Pendampingan Reviu Rencana Pengendalian Intern Lapis Dua;
5. Sosialisasi Reviu Lapis Tiga Rencana Pengendalian Intern Tahun 2024.

Seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL juga telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2023 melalui aplikasi SIMAWAS. Sampai dengan laporan ini disusun, tahapan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) terhadap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP unit kerja lingkup Ditjen PHL oleh tim Auditor Wilayah, masih berproses.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHL Wilayah II Medan dalam mendukung penyelenggaraan SPIP tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Permen LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023 oleh Inspektorat Wilayah I;
2. Mengikuti Pendampingan Penyusunan RPI SPIP oleh Inspektorat Wilayah I;
3. Melakukan sosialisasi Penyusunan RPI SPIP ke seluruh pegawai BPHL Wilayah II Medan.
4. Melakukan pemantauan kebijakan pengendalian triwulanan. Diharapkan setiap pekerjaan balai dapat memenuhi kriteria yang telah sesuai dengan perumusan SPIP, juga dilakukan pengendalian atas kebijakan yang telah disusun.

Tim pelaksana dan tim satgas SPIP BPHL Wilayah II Medan melakukan sosialisasi penyusunan RPI 2024 kepada seluruh pegawai BPHL Wilayah II Medan. Sosialisasi ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan 5 Tahun 2023 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Inspektorat Wilayah I. Diharapkan semua pegawai memahami mengenai penyusunan RPI dan data yang digunakan untuk sebagai bahan Penilaian Mandiri lebih baik. Tim pelaksana dan juga tim satgas SPIP BPHL Wilayah II Medan juga mengumpulkan data terkait penilaian mandiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi P3HPHL dan Seksi PEPHPHL. Data tersebut yang nantinya akan diinput pada aplikasi SPIP Online SIMAWAS Versi 2 yang telah dimutakhirkan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023.

Rincian Output 3 (RO-3) : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel

Untuk mencapai konsep good governance, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pada tahun 2023 telah disusun Laporan Keuangan Tahunan Periode Tahun 2022, Laporan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Triwulan III Tahun 2023. Dengan telah disusunnya Laporan Keuangan Ditjen PHL Tahun 2022, maka capaian Indikator Kinerja Kegiatan ‘Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel’ 2023 adalah sebesar 100%.

Laporan Keuangan Ditjen PHL memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-enam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Opini atas Laporan Keuangan menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas KLHK dalam mengelola keuangan. Opini WTP yang diperoleh selaras dengan upaya Ditjen PHL dalam meningkatkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 20 Juni 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL yaitu Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Laporan Kinerja 2022 menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Bappenas telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Untuk menjadi Kementerian/Lembaga outstanding sebagaimana Bappenas, Ditjen PHL akan terus menjalankan komitmen dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi Laporan Keuangan KLHK.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sudah mulai menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pelaporan.

Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan agar terus memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPHL Wilayah II Medan melakukan upaya antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola DIPA dan penyusun laporan keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan dengan mengikuti berbagai kegiatan e-learning yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara melalui Inventarisasi BMN, Stock opname barang persediaan, penyusunan RKBMN, pemindahtanganan dan penghapusan BMN.
3. Konsolidasi Pemutakhiran data SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan sehingga diperoleh data yang sama.
4. Meningkatkan koordinasi antara pengelola DIPA dan penyusun Laporan Keuangan agar tercipta Laporan Keuangan yang berkualitas.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara disampaikan tepat waktu.
6. Penyelesaian tagihan Kartu Kredit Pemerintah tepat waktu.
7. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas pengelolaan keuangan di satker BPHL Wilayah II Medan dilakukan oleh pihak internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bawah Laporan Keuangan telah disusun sesuai kaidah yang berlaku. Serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun telah memenuhi standar penyusunan SPJ.

Selama tahun 2023, BPHL Wilayah II Medan telah melaksanakan kegiatan keuangan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi BMN

Rekonsiliasi BMN bertujuan untuk penyamaan data BMN di laporan keuangan beserta nilai buku, agar tersedia nilai aset tetap yang kompatible di neraca. Bimtek penatausahaan BMN bertujuan penyusunan RKBMN TA. 2023 dan penatausahaan serta pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Tahun 2023. BPHL Wilayah II Medan telah membuat tiket RKBMN tahun 2025 pada aplikasi SIMAN, Plug in pernecanaan kemudian membuat pengadaan RKBMN pengadaan tahun 2025, RKBMN pemeliharaan tahun 2025.

2. Bimtek Pejabat Perbendaharaan

Kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Migrasi saldo awal yang terdiri dari persediaan, aset tetap dan saldo neraca.
- b. Melakukan pendetilan pada operator persediaan, operator komitmen, bendahara, jurnal persediaan, jurnal aset tepa, jurnal manual/penyesuaian.
- c. Validasi dan posting satker melakukan tutup periode pada neraca saldo.
- d. Setelah validasi dan posting satker dilakukan tutup periode pada neraca saldo.
- e. Output akhir adalah pelaporan dalam bentuk rekonsiliasi, laporan basis kas, laporan basis akrual dan laporan BMN rekonsiliasi.

Dalam rekonsiliasi laporan keuangan dihasilkan Berita Acara Rekonsiliasi Penetapan Aset Tetap dan GL Pelaporan yang ada pada satker BPHL Wilayah II Medan dan Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Baik pengelola DIPA dan juga penyusun laporan keuangan juga seringkali mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hal ini bertujuan dalam rangka koordinasi antara BPHL Wilayah II Medan dengan KPPN Medan.

3. Pengelolaan Keuangan Internal

Pengelolaan keuangan internal di BPHL Wilayah II Medan dengan meningkatkan koordinasi antara pegawai terkait yang ditugaskan sebagai pengelola DIPA dan penyusun laporan keuangan. KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, serta staff PPK bekerja sama dalam pengajuan dana di SAKTI dan realisasi anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada di balai dan kebijakan yang telah diatur Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Rincian Output 4 (RO-4) : Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif

Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif dilaksanakan dengan Identifikasi dan verifikasi/Updating Peta Arah Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian

Implementasi RPHJP/RPHJPD serta Pembentukan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) merupakan rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH baik KPHP maupun KPHL dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) merupakan rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH baik KPHP maupun KPHL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2023, BPHL Wilayah II Medan telah melaksanakan kegiatan Identifikasi dan verifikasi/Updating Peta Arah Pemanfaatan Hutan pada KPH Wilayah XV Kabanjahe. Sedangkan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi RPHJP/RPHJPD serta Pembentukan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan pada :

1. KPH Wilayah VII Gunung Tua
2. KPH Wilayah I Stabat
3. KPH Wilayah IV Balige
4. KPH Wilayah XII Tarutung
5. KPH Wilayah III Kisaran
6. KPH Wilayah V Aek Kanopan
7. KPH Wilayah XV Kabanjahe.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif, yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek;
2. Dukungan dari pemerintah pusat dengan kemudahan proses kegiatan penyusunan RPHJP ataupun ekspos melalui media daring;
3. Diluncurkannya SI RPHJP yang merupakan suatu upaya percepatan penyusunan RPHJP pada KPHP berbasis teknologi informasi, sehingga penyusunan maupun penilaian RPHJP KPHP akan lebih efisien.

Untuk Rincian Output ini BPHL Wilayah II Medan memperoleh anggaran sebesar Rp. 241,233,000,- dan dapat merealisasikannya sebesar 97,44% yakni sejumlah Rp. 235,058,000,-.



Gambar 6. Pengawasan dan Implementasi RPHJP/RPHJPD pada KPH Wilayah XV Kabanjahe

Rincian Output 5 (RO-5) : Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan fasilitasi dan pembinaan KPH Efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari. KPH Efektif diharapkan agar KPH sebagai organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara profesional, mandiri, dan berdaya guna, meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan yang mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari. Keberhasilan capaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, didukung oleh kinerja KPH yang dinilai baik dan efektif dalam pengelolaan kawasan hutan dan juga dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Verifikasi Penilaian Organisasi KPH Efektif telah dilaksanakan pada unit KPHP dan KPHL di wilayah KPH di Sumatera Utara, yaitu:

1. KPHL Unit XXX pada KPH Wilayah VIII Kotanopan
2. KPHL Unit XXIV dan KPHL Unit XXV pada KPH Wilayah XI Pandan
3. KPHP Unit I pada KPH Wilayah I Stabat
4. KPHL Unit IX pada KPH Wilayah II Pematang Siantar
5. KPHL Unit XIII pada KPH Wilayah III Kisaran

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

Realisasi atas Rincian Output ini menyerap anggaran sebesar Rp. 230,777,000,- dari PAGU anggaran sebesar Rp. 230,777,000,- atau senilai 100%.



VERIFIKASI PENILAIAN ORGANISASI KPH EFEKTIF DI KPHL UNIT XXX PADA KPH WILAYAH VIII KOTANOPAN, KPHL UNIT XXIV, DAN KPHL UNIT XXV PADA KPH WILAYAH XI PANDAN



Gambar 6. Verifikasi Penilaian Organisasi KPH Efektif di KPHP Unit I Stabat, KPHL Unit IX pada KPH Wilayah II Pematang Siantar dan KPHL Unit XIII pada KPH Wilayah III Kisaran

Rincian Output 6 (RO-6) : Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan. Pemberian PBPH baik pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan, selain itu juga untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Dalam rangka kemudahan dalam berinvestasi untuk penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha, permohonan PBPH diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui *Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach/OSS-RBA* (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko).

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan, yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari calon pemohon perizinan berusaha untuk melaksanakan pengelolaan hutan melalui multi usaha kehutanan;
2. Kemudahan dalam pengajuan permohonan PBPH melalui *Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach/OSS-RBA*.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha berupa Pemantauan dan monev usaha pemanfaatan hutan dan Supervisi kegiatan pemanfaatan hutan dengan target sebanyak 2 Badan Usaha dan telah terealisasi sebanyak 3 badan usaha pada PBPH yaitu:

1. PT. Panei Lika Sejahtera
2. PT. Sinarmulia Madina Kayuindo
3. PT. Monsanto Citra Nusantara

Alokasi anggaran untuk Rincian Output ini senilai Rp. 216,692,000,- terealisasi sebesar 100 % atau Rp. 216,692,000,-.



Gambar 7. kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha berupa Pemantauan dan monev usaha pemanfaatan hutan

Rincian Output 7 (RO-7) : Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kemitraan Multiusaha pada PBPH dan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kepada Kelompok Masyarakat di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan pada PBPH, yaitu :

Fasilitas dan pembinaan pemanfaatn hutan berbasis KTH telah dilakukan dengan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kemitraan PBPH dengan Masyarakat pada PBPH PT. Multi Sibolga Timber di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sedangkan Kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan kelompok masyarakat telah dilakukan melalui pelatihan budidaya lebah madu dengan KTH yg bermitra dengan PT. Toba Pulp Lestari.

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 95,000,000,- dengan realisasi senilai 99.99% atau Rp. 94,995,000,-.



Gambar 8. kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan PBPH dengan Masyarakat pada PBPH PT. Multi Sibolga Timber di Kabupaten Tapanuli Tengah



Gambar 9. peningkatan kapasitas/pelatihan kelompok masyarakat melalui pelatihan budidaya lebah madu dengan KTH yg bermitra dengan PT. Toba Pulp Lestari

Rincian Output 8 (RO-8) : Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Fasilitas Pengembangan Multiusaha Bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan dengan kegiatan berupa :

1. Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) HA/HT/IPPKH
2. Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi/fasilitas kegiatan multiusaha pada PBPH
3. Pengawasan dan pengendalian sertifikasi penilaian PHL/produksi hasil hutan/luas penanaman

Kegiatan Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan memiliki target sebanyak 1 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 5 Badan Usaha, yaitu:

1. PT. Sinar Belantara Indah
2. PT. Sumatera Sylva Lestari
3. PT. Sumatera Riang Lestari
4. PT. Multi Sibolga Timber
5. PT. Gunung Raya Utama Timber Industries

PBPH tersebut berkomitmen kuat untuk menerapkan kegiatan multiusaha . Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 363.607.000,- dengan realisasi senilai 99.97% atau Rp. 363,481,920 ,-.



Gambar 10 . Pengawasan dan pengendalian sertifikasi penilaian PHL/produksi hasil hutan/luas penanaman pada PBPH

Rincian Output 9 (RO-9) : Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan dilaksanakan dengan kegiatan berupa :

1. Pengawasan, fasilitasi dan pembinaan penerapan multiusaha kehutanan
2. Fasilitasi dan pembinaan usaha kemitraan kehutanan
3. Pengawasan kegiatan perlindungan hutan pada PBPH
4. Verifikasi penggunaan kawasan hutan untuk kemitraan kehutanan

Kegiatan Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan memiliki target sebanyak 4 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 4 Badan Usaha, yaitu:

1. PT. Putra Lika Perkasa
2. PT. Hutan Barumon Perkasa
3. PT. Anugerah Rimba Makmur
4. PT. Multi Sibolga Timber

Faktor penting pendukung keberhasilan capaian kinerja dari rincian output Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan, yaitu kesiapan PBPH baik segi manajerial maupun finansial dalam melaksanakan pengelolaan hutan melalui multi usaha kehutanan, sehingga dapat meningkatkan nilai hutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 632,201,000,- dengan realisasi senilai 99.86% atau Rp. 631,338,950,-.



Gambar 11. Pengawasan Kegiatan Perlindungan Hutan pada PBPH PT. Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Padang Lawas



Gambar 12. Fasilitas dan Pembinaan Usaha
Kemitraan Kehutanan pada PBPH PT. Toba
Pulp Lestari
Sektor Tele Di Kabuapten
Samosir



Rincian Output 10 (RO-10) : Pemantauan dan Evaluasi bidang luran dan Penatausahaan hasil Hutan

Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan dilaksanakan dengan kegiatan berupa :

1. Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Profesional GANISPH
2. Tertib Pelaksanaan luran Kehutanan dan Penatausahaan hasil Hutan
3. Pembekalan Operator SI-PUHH

Pelaksanaan kegiatan berupa money tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan memiliki target sebanyak 5 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 5 Badan Usaha, yaitu:

1. PT. Gunung Raya Utama Timber Industries
2. PT. Teluk Nauli
3. PT. Sinar Belantara Indah
4. PT. Sumatera Riang Lestari
5. PT. Toba Pulp Lestari

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Dalam rangka tertib penatausahaan hasil hutan, maka PBPH harus membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), yaitu dokumen yang memuat data produksi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu. PUHH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, sehingga PUHH berjalan dengan tertib dan lancar serta agar kelestarian hutan, hak-hak negara atas hasil hutan/pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dari rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan, yaitu :

1. Adanya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab PBPH dalam pengelolaan hutan secara legal;
2. Kemudahan pemantauan produktivitas PBPH melalui SI PUHH Online.



Gambar 13 . Pemantauan dan Evaluasi bidang luran dan Penatausahaan hasil Hutan pada PBPH PT. Gunung Raya Utama Timber Industries

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam Rincian Ouput ini, yaitu Bimbingan Teknis terhadap Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH). Bimbingan Teknis terhadap Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2023, yang dihadiri oleh beberapa GANISPH baik secara luring maupun daring di Provinsi Sumatera Utara Peserta secara luring dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang yang tiap orangnya mewakili PBPH, PBPHH, PHAT dan Pemegang Persetujuan PS diantaranya adalah CV. Buana Sari Gemilang, CV. Cipta Mandiri Lestari, CV. Jati Mulia, CV. Mestika Jaya Abadi, CV. Salim Tebing Timberindo, CV. Sammik, KLP. Makmur Jaya, KTH Bonan Dolok Indah, PHAT David Hapang, PHAT Syafaruddin Harahap, PT. Ahlindo Perkasa Alam, PT. Candi Kekal Jaya, PT. Karyabhakti Manunggal, PT. Sintong Sari Union, PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT. Tiga Mutiara Nusantara, UD. Abadi, UD. Cipta, UD. Cipta Prima, UD. Dwiguna, UD. Gomez, UD. Lubuk Raya, UD. MT, UD. Nangin Jaya, UD. Ramin, UD. Selamat Sejahtera, UD. Sinar Mar Jaya, UD. Sumber Mas Abadi serta beberapa PBPH, PBPHH, PHAT dan PS lainnya.



Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan

Pagu anggaran atas Rincian Output BDH.002 Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan tersebut sebesar Rp. 177,965,000,- dengan realisasi senilai 100% atau Rp. 177,964,800,-.

Rincian Output 11 (RO-11) : Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kegiatan monitoring terhadap pembayaran iuran dan penataan hasil hutan melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) yaitu aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dapat berupa PSDH dan atau DR. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara, sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

BPHL Wilayah II Medan telah melaksanakan kegiatan Pemantauan dan evaluasi tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan pada 11 Badan Usaha yang ada di Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Anugerah Rimba Makmur
2. PT. Hutan Barumon Perkasa
3. PT. Multi Sibolga Timber
4. PT. Barumon Raya Padang Langkat
5. PT. Putra Lika Perkasa
6. PT. Sinar Belantara Indah
7. PT. Sumatera Riang Lestari
8. PT. Sumatera Sylva Lestari
9. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun
10. PT. Toba Pulp Lestari
11. PT. Ultra Sumatera Dairy Farm

Pelaksanaan Penyelesaian piutang PNBP pada BPHL Wilayah II Medan dengan tim KPKNL Sumatera Utara telah dilaksanakan pada:

1. 6 debitur (Medan)
2. PT. Aik Gadis Timber
3. Koperasi Nuansa Baru



Gambar 15. kegiatan Pemantauan dan evaluasi tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan

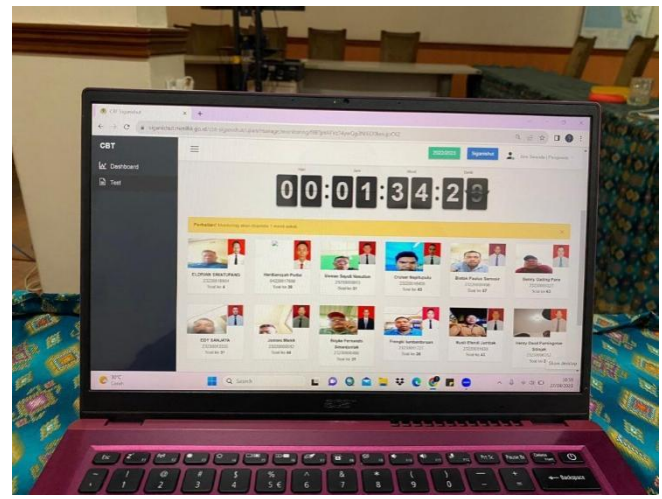
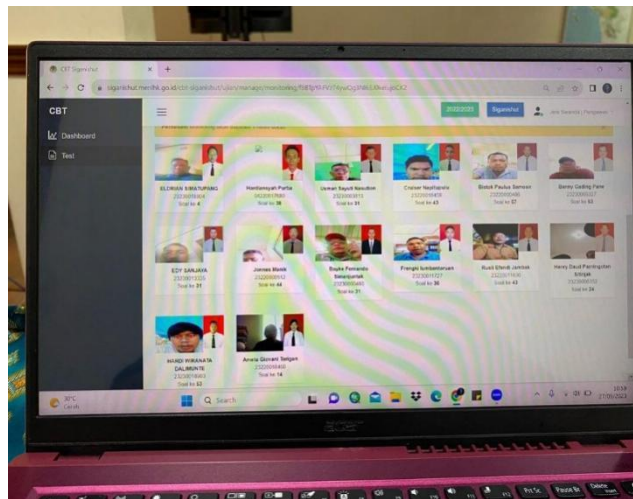
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga teknis oleh BPHL Wilayah II Medan juga telah dilaksanakan terhadap seluruh GANISPH yang telah diterbitkan penugasan oleh Balai.

Penilaian Kinerja GANISPH di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan dipusatkan di 8 lokasi berbeda yaitu Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Padangsidempuan, Aekkanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Balige Kabupaten Toba, Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Penilaian Kinerja GANISPH Tahun 2023 telah dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 05 Oktober 2023 s.d 01 Nopember 2023 di Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi penugasan, dan Penilaian Kinerja Susulan pada tanggal 13 & 29 Nopember 2023.

Peserta Penilaian Kinerja adalah GANISPH di Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan penugasan melalui Sistem Informai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) yang dibuktikan dengan SIM kartu penugasan berjumlah 410 orang. Hasil dari Penilaian Kinerja GANISPH Tahun 2023 yaitu GANISPH yang mendapatkan Kriteria Layak sebanyak 155 orang, Kriteria Layak dengan Pembinaan sebanyak 222 orang dan GANISPH yang Tidak Layak sebanyak 33 orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bahan pengendalian dalam proses penugasan GANISPH, sebagai bahan pertimbangan teknis atau kelayakan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan hutan lestari dan bahan pembinaan terhadap GANISPH.

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 367,705,000,- dengan realisasi senilai 100% atau Rp. 367,705,000,-.



Gambar 16. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan

Rincian Output 12 (RO-12) : Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitas/pembinaan teknis perizinan berusaha pengolahan hasil hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan pada 22 Badan Usaha antara lain:

Tabel 10 . Fasilitas/pembinaan teknis pada PBPHH di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan

No.	PBPHH	No.	PBPHH
1	UD. Sonang Persada Timber	12	PT. Karya Mandala Abadi
2	Dorman panggabean	13	UD. Mitra Perkasa
3	CV. Sumber Sukses Jaya	14	UD. Dua Saudara
4	UD. Hidup Baru	15	UD. Selamat Sejahtera
5	UD. Rimba Adiaksa Sentosa	16	UD. Rosi Mandiri
6	UD. Sumber Rezeki	17	UD. Rimba Jaya Abadi
7	UD. Aidil Surbakti	18	UD. Prima Mahoni Indah
8	Usaha Irsan Batubara	19	UD. Rembulan Jaya
9	PT. Ratimbo Utama	20	Sukadame Satu
10	PT. Prabu Jaya	21	UD. Simanampang
11	PT. Sumatera Timberindo Industri	22	UD. Eltar Jaya

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dari rincian output Fasilitas dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Kesadaran PBPHH maupun perizinan lain tentang arti legalitas kayu dalam kancah perekonomian nasional maupun skala internasional;
2. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitas PBPHH melalui bimbingan teknis.

BPHL Wilayah II Medan telah melaksanakan kegiatan Koordinasi perizinan berusaha hasil hutan skala usaha kecil dan menengah pada 4 PBPHH yaitu:

Tabel 11. Kegiatan Koordinasi perizinan berusaha hasil hutan skala usaha kecil dan menengah

No.	PBPHH
1	UD. Andika Perkasa
2	UD. Linsa
3	An. Romali Jaya Putera Medan
4	UD. Putera Imanuel

BPHL Wilayah II Medan telah melaksanakan Pembekalan/Pelatihan Sistem Informasi Bidang PHL Sosialisasi/Pembekalan SIPUHH HHBK pada Perizinan Perhutanan Sosial sebanyak 2 kali bertempat dipematangsiantar pada tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan bertempat di Padangsidempuan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.



Gambar 17. Kegiatan Pembekalan Operator SIPUHH pada pemegang persetujuan Perhutanan Sosial (HKM/HD/Kemitraan) di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan bertempat di Pematangsiantar



Gambar 18. Kegiatan Pembekalan Operator SIPUHH pada pemegang persetujuan Perhutanan Sosial (HKM/HD/Kemitraan) di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan bertempat di Padangsidempuan

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 265,011,000,- dengan realisasi senilai 100% atau Rp. 265,010,750,-.

Rincian Output 13 (RO-13) : Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL

Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL dilaksanakan dengan Inventarisasi dan Verifikasi UMKM melalui sosialisasi Peraturan Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dengan Target 1 UMKM. Pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Inventarisasi dan Verifikasi UMKM
2. Fasilitasi Penilikan SVLK bagi UMKM
3. Sosialisasi Pembekalan SVLK

Inventarisasi dan Verifikasi UMKM telah dilaksanakan oleh BPHL Wilayah II Medan pada 18 PBPHH yaitu:

Tabel 12. Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi UMKM oleh BPHL Wilayah II Medan

No.	PBPHH
1	PT. Eka Tunas Perkasa
2	PT. Indah Wahana Sejati
3	PT. Sumatera Jaya Wahana Perkasa
4	PT. Anugerah Rimba Makmur
5	UD. Jasa Ecowood
6	PT. Ligaindo Kayu Lestari
7	PT. Putra flora
8	PT. Change Rimba Nusantara
9	PT. Tiga Mitra Sentosa
10	PT. Timberland Industri
11	PT. Sintong Sari Union
12	CV. Surya Timber Perkasa
13	UD. Jadi jaya
14	UD. Sami Sami
15	CV. Bintang Terang
16	KP. Majuj Jaya
17	PT. Muklim Agung Jaya
18	CV. Somba Group

Fasilitasi Penilikan SVLK bagi UMKM telah dilaksanakan dengan Kontrak/SPK tgl 1 November s/d 30 November 2023 Nilai SPK : Rp. 24.927.500 Pada PBPHH CV. Mardongan Jaya.

Sosialisasi/Pembekalan SVLK bersama Anggota Komisi IV DPR RI Bapak Djarot Syaiful Hidayat yang dilaksanakan di Kota Kisaran pada tanggal 20 Juli 2023 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 50 orang.

Inventarisasi dan verifikasi UMKM dilaksanakan dalam rangka menentukan UMKM mana yang akan diberikan fasilitas SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) oleh pemerintah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di wilayah Sumatera Utara dapat meningkat daya saingnya melalui legalitas bahan baku yang jelas. Dengan meningkatnya kepercayaan pasar membeli produk yang bersertifikat legalitas, maka akan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dari rincian output Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan, yaitu :

1. Komitmen dan konsistensi UMKM dalam pengelolaan hasil hutan yang legal;
2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan inventarisasi dan verifikasi UMKM.

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 221,683,000,- dengan realisasi senilai 99.85% atau Rp. 221,341,750,-.



Gambar 19. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan

Rincian Output 14 (RO-14) : Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dengan target 9 Badan Usaha telah dilaksanakan dengan kegiatan berupa:

1. Pengawasan/supervisi dan monev perizinan berusaha pengolahan hasil hutan
2. Pemantauan dan monev harga pasar/RPBBI/sertifikasi industri hasil hutan

Pengawasan/supervisi dan monev perizinan berusaha pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan oleh BPHL Wilayah II Medan pada 19 PBPHH yaitu:

Tabel 13. Kegiatan Pengawasan/supervisi dan monev pada PBPHH

No.	PBPHH	No.	PBPHH
1	UD. Rait Group	11	UD. Sukses Mandiri
2	UD. Cipta	12	PT. Karya Bakti Manunggal
3	CV. Surya Timur Perkasa	13	UD. Sonang Persada Timber
4	CV. Morawa Timber Industri	14	Dorman Panggabean
5	PT. Karya Wisesa (Eks PT. Karunia Makmur)	15	UD. Sukses Mandiri
6	PT. Mujur Timber	16	UD. Terang Harapan
7	PT. Sumatera Jaya Lestari	17	PT. Kasmu Prawono Utama
8	PT. Sumber Karindo Sakti	18	CV. Bangun
9	PT. Tjipta Rimba Djaya	19	CV. Putra Mulia
10	PT. Tunasrindo Prima Jaya		

Sedangkan kegiatan Pemantauan dan monev harga pasar/RPBB/sertifikasi industri hasil hutan telah dilaksanakan oleh BPHL Wilayah II Medan pada 40 PBPHH yaitu:

Tabel 14. Kegiatan Pemantauan dan monev harga pasar/RPBB/sertifikasi industri hasil hutan pada PBPHH

No.	PBPHH	No.	PBPHH
1	CV. Putra Mulia	21	UD. Sinar jaya
2	CV. Asco Jaya	22	CV. Anugrah Mandiri Sukses
3	Kilang Papan Hasil	23	UD. Rimba
4	UD. Mutiara Jaya	24	Mhd. Rizal Gulo
5	PT. Cipta Prima Interwoods Development Industry	25	PT. Andalas Sejahtera Industri
6	CV. Mestika Jaya Abadi	26	PT. Budi Tamora Permai
7	UD. Sumber Alam Baru	27	UD. Naga Timbul Jaya
8	UD. Makmur	28	PT. Elang Tenaga Bersama
9	UD. Hot Dame	29	CV. Dolok Mas
10	CV. Bintang Gemilang	30	CV. Sarido
11	CV. Surya Timur Perkasa	31	UD. Togu
12	PUD. Jadi Jaya	32	CV. Jati Mulia
13	UD. Anugrah Alam Lestari	33	UD. Lubuk Raya
14	CV. Lamhot Mandiri Jaya	34	CV. Sammik
15	UD. Purnama Jaya Lestari	35	An. M. Saleh Nasution
16	PT. Tiga Mutiara Nusantara	36	UD. AK. Nasution
17	CV. Cipta Mandiri Lestari	37	UD. Abdul Basid
18	UD. Karya Bersama	38	UD. Aria Abdiguna Abadi
19	PT. Candi Kekal Jaya	39	UD. Buana Sari Gemilang
20	CV. Morawa Timber	40	PT. Anugrah Surya Nusantara

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja PBPHH dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PBPHH dalam mengolah hasil hutan kayu, meliputi penggunaan bahan baku, perolehan produk pengolahan hasil hutan, pemanfaatan produk hasil pengolahan hasil hutan dan perolehan/pemanfaatan limbah pengolahan hasil hutan. Dengan adanya kegiatan ini, pengolahan hasil hutan kayu dapat terpantau dan terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mewujudkan kelestarian hutan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dari rincian output Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya, yaitu :

1. Pemahaman PBPHH akan ketentuan hukum dalam pengolahan hasil hutan kayu;
2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi PBPHH.

Alokasi anggaran untuk output ini sebesar Rp. 353,615,000,- dengan realisasi senilai 99.92% atau Rp. 353,339,150,-.



Gambar 20. Kegiatan Pengawasan atau pengendalian/evaluasi kinerja Perizinan Pengolahan Hasil Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah II Medan

B. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

1. Perhitungan Anggaran

PAGU anggaran BPHL Wilayah II Medan semula Rp.9.8.69.828.000,- mengalami 6 kali revisi dengan nilai akhir Rp.9,077,220,000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 7,536,102,000,- dan PNPB sebesar Rp. 1,541,118,000,- .

Secara keseluruhan target kinerja BPHL Wilayah II Medan atas Indikator Kinerja kegiatan diperoleh pencapaian realisasi sebesar 99,87%. Hasil pencapaian kinerja BPHL Wilayah II Medan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Rincian Target dan Realisasi Capaian Output BPHL Wilayah II Tahun 2023

No	Rincian Output	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
A. Program Dukungan Manajemen				
1	Layanan Umum	180,000,000	179,960,000	99,98
2	Layanan perkantoran BPHL	5,731,763,000	5,727,969,160	99,93
B. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
3	Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif	241,233,000	235,058,000	97,44
4	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	230,777,000	230,777,000	100
5	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	216,692,000	216,692,000	100
6	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	363,575,000	363,481,920	99,97
7	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	632,201,000	631,338,950	99,86
8	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	95,000,000	94,995,000	99,99

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

9	Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	177,965,000	177,964,800	100
10	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	367,705,000	367,705,000	100
11	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	265,011,000	265,010,750	100
12	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	353,615,000	353,339,150	99,92
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	221,683,000	221,341,750	99,85
TOTAL		9,077,220,000	9,065,633,480	99,87

Sumber Data : OM SPAN per 11 Januari 2024

Realisasi anggaran BPHL Wilayah II Medan berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja Tahun 2023 setelah *Automatic Adjustment* yang diambil melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 11 Januari 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana dan Jenis Belanja Tahun 2023

Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
RM	Pagu	4,400,763,000	3,135,339,000	0	7,536,102,000
	Realisasi	4,395,285,624	3,125,832,160	0	7,521,117,784
	Persentase	(99.88%)	(99.70%)	(0%)	(99.80%)
PNBP	Pagu	0	1,541,118,000	0	1,541,118,000
	Realisasi	0	1,540,322,500	0	1,540,322,500
	Persentase	(0%)	(99.95%)	(0%)	(99.95%)
Grand Total	Pagu	4,400,763,000	4,676,457,000	0	9,077,220,000
	Realisasi	4,395,285,624	4,666,154,660	0	9,065,633,480
	Persentase	(99.88%)	(99.78%)	(0%)	99,87

2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

EKA merupakan instrumen moneyv kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 22/PMK.02/2021 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Efisiensi, dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan. Tujuan dari penilaian EKA adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kegiatan/program (IKK/IKP).

Berdasarkan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPHL Wilayah II Medan sebesar 85,79 termasuk dalam kategori Baik.

No	Indikator	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	99,83
2	Konsistensi	99,90
3	Capaian Realisasi Output	100,00
4	Efisiensi	0,17
5	Nilai Efisiensi	50,43

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

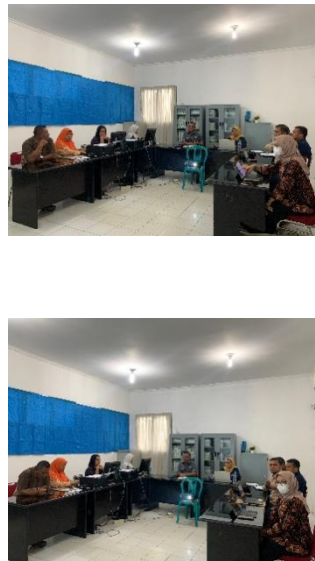
IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran IKPA meliputi 3 aspek dengan 8 indikator, yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 11 Januari 2024, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPHL Wilayah II Medan sebesar 99,23.

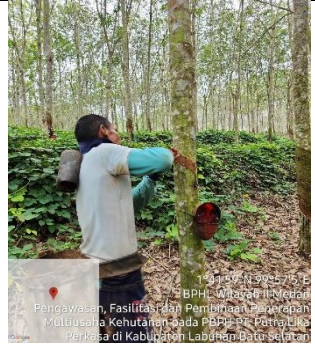
C. CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2023 BPHL Wilayah II Medan juga mendukung kegiatan prioritas nasional, melalui Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002), Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (6731.QIH.001), Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL (6733.QDG.002), dan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya (6733.QIH.001) dapat dilihat dalam tabel 18: .

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI						
Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002)	Target tercantum pada DIPA masing- masing BPHL (BPHL I – XVI) – 16 Lembaga					
BPHL Wil . II	1 Lembaga	2	Kegiatan Verifikasi Penilaian Organisasi KPH Efektif sudah dilaksanakan pada 6 unit KPH diantaranya yaitu KPHL Unit XXX pada KPH Wilayah VIII Kotanopan, KPHL Unit XXIV, KPHL Unit XXV pada KPH Wilayah XI Pandan, KPHP unit I pada KPH Wilayah I Stabat, KPHL unit IX pada KPH Wilayah II Pematang Siantar dan	Dokumen verifikasi yang disiapkan oleh masing-masing KPH belum lengkap sehingga setelah perjalanan dinas, tim verifikasi harus melakukan pengecekan dokumen kembali setelah KPH melengkapi data dan dokumen	Diberikan sertifikat KPH efektif kepada KPH yang nilai verifikasinya efektif	 

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
			KPHL Unit XIII pada KPH Wilayah III Kisaran pada bulan agustus, dan telah dilakukan tinjau lapangan oleh tim BRPH pada KPHP unit I Langkat dan KPHL unit XIII Asahan. Melalui hasil verifikasi dan tinjau lapangan, terdapat 2 unit KPH yang ditetapkan menjadi organisasi KPH yang efektif diantara nya yaitu KPHP unit I Langkat dengan Nomor SK.10/BRPH/PKPH/HPL .0/9/2023 dan KPHL unit XIII Asahan dengan Nomor SK.12/BRPH/PKPH/HPL .0/12/2023	pendukung, dan masih adanya kekurang pahaman KPH terhadap pertanyaan pada matriks, sehingga pada saat verifikasi terdapat perubahan nilai.		

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
						 
Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (6731.QIH.001)	Target tercantum pada DIPA masing- masing BPHL (BPHL I – XVI) – 52 Badan					

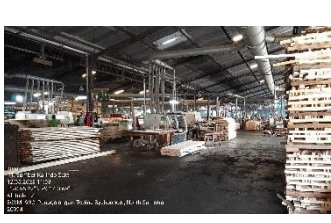
PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
	Usaha					
BPHL Wil . II	4 Badan Usaha	4	1. PBPH PT. Putra Lika Perkasa telah melaksanakan multiusaha kehutanan dengan menghasilkan HHBK (getah karet dan tandan buah sawit) serta kayu karet 2. PT. Anugerah Rimba Makmur - Kegiatan multiusaha sudah masuk RKTPH 2023, namun belum terealisasi - Kegiatan multiusaha akan dilaksanakan melalui kemitraan dengan masyarakat (4 KTH)	1. PBPH PT. Putra Lika Perkasa Adanya konflik sosial dengan masyarakat. PBPH belum berani me-replanting tanaman karet yang usianya mendekati daur 2. PT. Anugerah Rimba Makmur - Penentuan areal masih dalam pembahasan 3. PT. Hutan Barumon Perkasa - Terdapat konflik sosial dengan	1. PBPH PT. Putra Lika Perkasa Perhutanan sosial dalam skema kemitraan kehutanan belum dapat dilaksanakan karena potensi konflik yang tinggi. 2. PT. Anugerah Rimba Makmur - Percepatan penentuan areal kemitraan 3. PT. Hutan Barumon Perkasa - Mengusahakan kemitraan kehutanan dengan masyarakat sekitar areal.	 

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
			3. PT. Hutan Barumon Perkasa - Tanaman karet menghasilkan getah karet. Namun belum ada replanting tanaman karet, sehingga belum ada produk kayu karet 4. PT. Multi Sibolga Timber - Masih fokus pada kegiatan TPTI - Telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar - Belum menerapkan multiusaha kehutanan	masyarakat, dimana terdapat areal ±100 ha yang diracun masyarakat. 4. PT. Multi Sibolga Timber - Aktif kembali sejak 2022, sehingga masih fokus menyusun perencanaan dan kegiatan TPTI	4. PT. Multi Sibolga Timber - Akan memasukkan kegiatan multiusaha kehutanan pada dokumen perencanaan	  

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL (6733.QDG.002)	Target tercantum pada DIPA masing- masing BPHL (BPHL I – XVI) – 75 UMKM					
BPHL Wil . II	1 UMKM	1	- Sertifikasi dilakukan pada PBPHH CV. Mardongan Jaya (Kab. Deli Serdang) - Sertifikasi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 18/PPK-3/BPHL-II/2023 tanggal 1 November 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.927.500 - Jangka waktu kontrak selama 30 hari (1-30 Nov 2023)	- Perlu pemberian pemahaman terkait SVLK kepada pimpinan PBPHH.	- CV. Mardongan Jaya dinyatakan lulus dengan sertifikat legalitas nomor 205-ISE-LPVI-022-IDN dan masa berlaku 28 November 2023 sampai dengan 27 November 2029	

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya (6733.QIH.001)	Target tercantum pada DIPA masing-masing BPHL (BPHL I – XVI) – 170 Badan Usaha					
BPHL Wil . II	9 Badan Usaha	9	1. PT. Tiga Mutiara Nusantara 2. CV. Anugerah Mandiri sukses 3. PT. Mujur Timber - Bahan baku berasal dari PBPH-HA - Realisasi produksi selama 3 tahun terakhir <25% - Rendemen	1. PT. Tiga Mutiara Nusantara - 2. CV. Anugerah Mandiri sukses - 3. PT. Mujur Timber - Permintaan plywood dari pasar	1. PT. Tiga Mutiara Nusantara - 2. CV. Anugerah Mandiri sukses - 3. PT. Mujur Timber - Pengurangan produksi plywood yang disesuaikan dengan	

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
			produksi efisien 4. PT. Tjipta Rimba Djaja - Bahan baku berasal dari hutan rakyat kayu tanaman budidaya - Realisasi produksi selama 3 tahun terakhir <5% - Rendemen produksi sangat efisien 5. PT. Sumber Karindo Sakti - Bahan baku berasal dari hutan rakyat - Realisasi produksi selama 3 tahun terakhir <5% - Rendemen produksi efisien 6. PT. Karyabhakti	internasional menurun. 4. PT. Tjipta Rimba Djaja - Kesulitan memenuhi bahan baku dan pemasaran kayu olahan 5. PT. Sumber Karindo Sakti - Kesulitan memenuhi bahan baku dan pemasaran kayu olahan 6. PT. Karyabhakti Manunggal - Harga produk turun - Stok kayu bulat pada	permintaan 4. PT. Tjipta Rimba Djaja - Mencari alternatif bahan baku dan pemasaran 5. PT. Sumber Karindo Sakti - Melakukan penanaman sengon - Merencanakan produk baru berupa plywood 6. PT. Karyabhakti Manunggal - Akan berkoordinasi dengan operator SIPUHH pada BPHL 7. PT. Sumatera Jaya Lestari	  

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
			Manunggal - Memiliki GANISPH sesuai dengan ketentuan - Sudah menyampaikan kewajiban. - Sumber bahan baku dari PHAT 7. PT. Sumatera Jaya Lestari - Memproduksi wood pellet dengan bahan baku limbah produksi kayu gergajian - Orientasi pemasaran ekspor 8. PT. Pita Rimba - Tidak beroperasi - Mengirim laporan setiap bulan. 9. PT. Citra Kencana	SIPUHH bernilai minus 7. PT. Sumatera Jaya Lestari - Kalah bersaing dengan produk dari Vietnam dan Rusia. 8. PT. Pita Rimba - 9. PT. Citra Kencana Industri -	- Penyesuaian harga dengan mempertimbangkan factor produksi dan situasi global. 8. PT. Pita Rimba - 9. PT. Citra Kencana Industri -	 

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 BPHL WILAYAH II MEDAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK PRIORITAS	Target 2023	Realisasi Fisik/RO s.d B03	Deskripsi Singkat (termasuk penjelasan progres)	Permasalahan/ Kendala/ Tantangan	Upaya Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
			Industri - Telah menyampaikan RKOPHH - Telah menerapkan SVLK			

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan kinerja BPHL Wilayah II Medan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program kerja BPHL Wilayah II Medan menuju good governance. BPHL Wilayah II Medan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi dan kondisi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur BPHL Wilayah II Medan telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari uraian di atas, kesimpulan umum mengenai pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Anggaran
PAGU anggaran BPHL Wilayah II Medan Tahun 2023 sebesar Rp.9,077,220,000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 7,536,102,000,- dan PNPB sebesar Rp. 1,541,118,000,- , dengan realisasi 9,065,633,480,- (99,87).
- Capaian Kinerja (Output)
Secara fisik pencapaian kinerja BPHL Wilayah II Medan tahun 2023 rincian output secara garis besar mencapai 109,23%, sedangkan untuk Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PHL senilai 95,88%. Hal ini karena komitmen kepala BPHL Wilayah II Medan beserta seluruh pegawai BPHL Wilayah II Medan untuk melaksanakan seluruh kegiatan semaksimal mungkin.
- Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi sumber daya BPHL Wilayah II Medan senilai 0,91.

B. LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan evaluasi atas pencapaian sebelumnya, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan anggaran dengan cara:

1. Merencanakan dengan sebaik-baiknya kegiatan tahun anggaran 2023 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan efisien;
2. Menyusun jadwal yang optimis namun realistis dan mematuhi rencana-rencana yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan monitoring/pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan;
4. Menjalin komunikasi dan koordinasi secara baik dengan para pelaku unit manajemen dan mitra kerja.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini dapat menjadi salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja BPHL Wilayah II Medan bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kusnadi, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Kusnadi, S.Hut., M.Si.
NIP. 19660922 199803 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH II MEDAN
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	
		Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
		Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	
5	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha
		Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	
6	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
		Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	
		Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	5 Badan Usaha
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha
		Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	9 Badan Usaha
8	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilaian SVLK	
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM

Anggaran :
Rp. 9.077.220.000

Jakarta, 15 Desember 2023

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,

Kepala Balai,

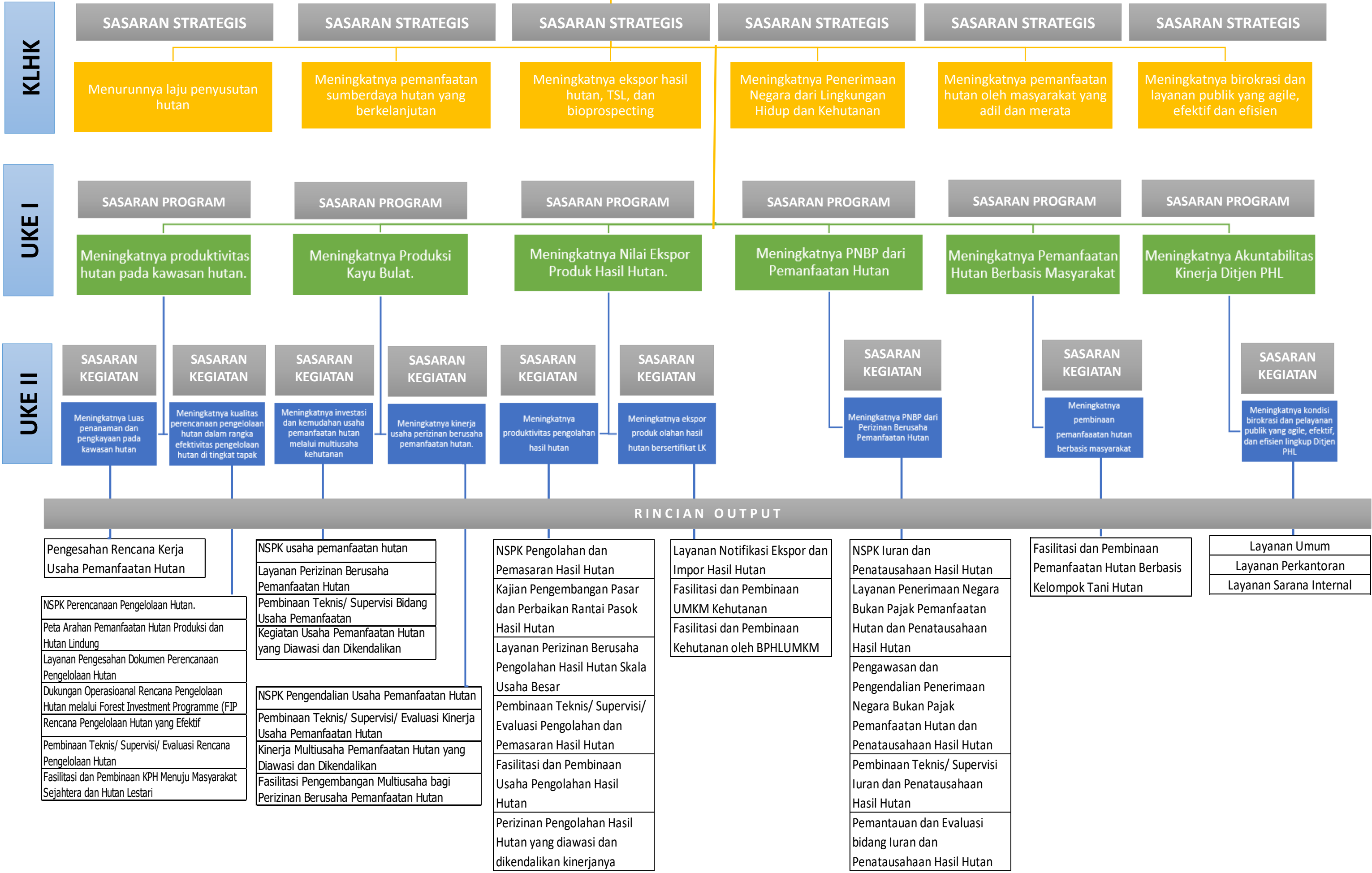


Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001



Kusnadi, S.Hut., M.Si.
NIP. 19660922 199803 1 002

POHON KINERJA DITJEN PHL T.A. 2023



MATRIKS CASCADING IKP, IKK, RO DITJEN PHL 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN
T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)	6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.	6729.AFA.001.051 - Pembahasan dan Penyusunan NSPK 6729.AFA.001.052 - Konsultasi Publik NSPK
				6729.BAH.001 - Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6729.BAH.001.051 - Identifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Rencana 6729.BAH.001.052 - Layanan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan 6729.BAH.001.053 - Penyiapan Database Pemanfaatan Kawasan Hutan
			T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	6729.BAB.001.051 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Rencana Pengelolaan 6729.BAB.001.052 - Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan 6729.BAB.001.053 - Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan
				6729.BDB.001 - Dukungan Operasional Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	6729.BDB.001.051 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH
				6729.BIC.001 - Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	6729.BIC.001.051 - Identifikasi dan verifikasi/Updating Peta Arahan Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi RPHJP/RPHJpd serta Pembentukan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
			T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	6729.QDB.001.051 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan oleh KPH 6729.QDB.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Pembentukan KPH
				6729.QDB.002 - Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	6729.QDB.002.051 - Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari 6729.QDB.002.052 - Fasilitas perlindungan dan pengamanan hutan pada area yang belum dibebani izin
			T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	6731.QAC.001 - Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	6731.QAC.001.051 - Supervisi Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Berbasis Multiusaha Kehutanan 6731.QAC.001.052 - Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.	T2.S2.1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan	6730.AFA.001.051 - Pembahasan dan Penyusunan NSPK 6730.AFA.001.052 - Konsultasi Publik
				6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	6730.BAH.001.051 - Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelahaan Areal dan Peta
			T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)	6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	6730.BDH.001.051 - Bimbingan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan 6730.BDH.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
				6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	6730.BIH.001.051 - Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
			T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)	6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	6731.AFA.001.051 - Pembahasan dan Penyusunan NSPK 6731.AFA.001.052 - Konsultasi Publik
				6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	6731.BDH.001.051 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 6731.BDH.001.052 - Pembinaan dan Pengembangan Multi Usaha Kehutanan
			T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)	6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	6731.QIH.001.051 - Pengawasan dan pengendalian penanaman/produksi hasil hutan/Multiusaha Kehutanan 6731.QIH.001.052 - Pengawasan dan pengendalian Perlindungan Hutan
				6731.BDH.002 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	6731.BDH.002.051 - Fasilitas dan Pembinaan Kegiatan Multi Usaha Kehutanan/ Perlindungan Hutan/ Kemitraan Kehutanan
			T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH)	6731.BDD.001 - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	6731.BDD.001.051 - Fasilitas dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat
T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.	T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH)	6731.BDD.001 - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	6731.BDD.001.051 - Fasilitas dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat
T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK.	T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)	6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	6732.AFA.001.051 - Pembahasan dan Penyusunan NSPK 6732.AFA.001.052 - Konsultasi Publik NSPK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.				6732.BAC.001 - Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	6732.BAC.001.051 - Layanan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional Bidang Pemanfaatan Hutan
				6732.BIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	6732.BAC.001.052 - Layanan Iuran Kehutanan
				T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH)	6732.BIH.001.051 - Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan
					6732.BDH.001.051 - Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)	6732.BDH.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	6732.BDH.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Tertib Iuran Kehutanan
				6732.BDH.002 - Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	6732.BDH.001.053 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan
				6732.BDH.002.051 - Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	6732.BDH.002.051 - Fasilitas dan Pembinaan Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Penatausahaan hasil Hutan
				6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	6733.AFA.001.051 - Pembahasan dan Penyusunan NSPK
				6733.PBV.001 - Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	6733.AFA.001.052 - Konsultasi Publik NSPK
				6733.QAC.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	6733.PBV.001.051 - Penyusunan Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan
				6733.QDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	6733.QAC.001.051 - Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar
				6733.QDH.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi LVLK	6733.QAC.001.052 - Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Besar
				6733.QDH.001.053 - Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Pelaku Ekspor/ Impor Produk Industri Kehutanan	6733.QDH.001.051 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
				6733.BDH.002 - Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDH.001.052 - Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi LVLK
				6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	6733.QDH.001.053 - Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Pelaku Ekspor/ Impor Produk Industri Kehutanan
				6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	6733.BDH.002.051 - Fasilitas/Sosialisasi/Pendampingan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah
				6733.QDG.001 - Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan	6733.BDH.002.052 - Pembinaan Teknis Usaha Pengolahan hasil hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah
				6733.QDG.002 - Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	6733.QIH.001.051 - Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan / Harga Pasar Produk Olahan Hasil Hutan
					6733.BAC.001.051 - Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Hasil Hutan
					6733.QDG.001.051 - Fasilitas Sertifikan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM
					6733.QDG.001.052 - Fasilitas Pelatihan Auditor/Asesor/Pendamping SVLK Bagi Eksportir Industri Kecil / UMKM
					6733.QDG.001.053 - Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK
					6733.QDG.001.054 - Supervisi Impelementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian
					6733.QDG.001.055 - Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis
					6733.QDG.002.051 - Fasilitas Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL

Catatan:

	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU
	IKP
	IKK
	RO Pusat
	RO Pusat dan BPHL
	RO BPHL